

MENCARI AKAR KONFLIK HORIZONTAL MASYARAKAT JAKARTA (DITINJAU DARI SUDUT KAMTIBMAS)

Oleh AKBP Drs. Eddy Ichwanto, MSi

PENGANTAR

Masalah ini bertolak dari pemikiran bahwa fenomena konflik merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat manusia itu sendiri. Konflik merupakan salah satu sisi kehidupan bermasyarakat. Konflik potensial terjadi dalam masyarakat serta ada secara laten di dalam masyarakat. Dalam diskusi ini yang menjadi masalahnya apakah konflik horizontal di masyarakat yang menjurus pada tindakan kekerasan dan penghancuran dengan melibatkan antar etnis atau suku bangsa dan kelompok pada masyarakat Jakarta perlu dicari akar penyebabnya? Karena konflik horizontal yang melahirkan kekerasan tersebut dari sudut pandang Kamtibmas menimbulkan kerugian yang tidak terhitung, sehingga ketentraman dan keteraturan sosial kehidupan warga masyarakat Jakarta sangat terganggu.

KONFLIK DAN KEKERASAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.

Sekali lagi bahwa konflik dan kekerasan merupakan fenomena yang laten dalam masyarakat. Tidak pernah ada suatu masyarakat yang hidup tanpa konflik dan kekerasan, maka benar bila penggagas diskusi ini mengatakan bahwa masyarakat Jakarta sangat rentan terhadap konflik horizontal yang menimbulkan kekerasan, kerusakan, korban jiwa manusia dan harta benda. Parsudi Suparlan (2000:7a) mengatakan bahwa konflik horizontal dapat terjadi karena dipicu oleh berbagai faktor

yaitu bisa karena salah satu pihak mencari gara-gara, karena merasa direndahkan martabatnya oleh kelompok lain, karena kalah dalam persaingan atau perkelahian, balas dendam yang kemudian memicu perang dengan melibatkan sejumlah anggota atau kelompoknya melawan kelompok lain yang dianggap sebagai musuh.

Oleh karena itu konflik horizontal masyarakat Jakarta yang terjadi di daerah Matraman (Pasar Pramuka), Kelurahan Berian dengan Palmeriam, warga Kalipasir dengan Kwitang, konflik Tanah Abang dan wilayah lainnya dapat dipandang sebagai perwujudan akumulasi berbagai faktor yang menghasilkan kekerasan untuk saling melawan kelompok lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal konflik tidak selalu berkonotasi negatif karena konflik pada situasi tertentu berguna bagi pemacu perubahan masyarakat (Peter Harris dan Ben Reilly, 2000 : 35). Sebagai pemacu perubahan dalam kehidupan masyarakat seharusnya konflik dalam masa reformasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi kehidupan atau kebudayaan demokrasi yang menghasilkan masyarakat yang aman dan sejahtera sesuai dengan "Tata Tertem Kertia Raharja".

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, konflik harus didasarkan atas aturan main yang adil dan beradab yang mengacu kepada hukum dan konvensi yang berlaku selalu ada wasit atau juri yang bertindak sebagai orang ketiga yang netral agar konflik-konflik tersebut tidak menghasilkan kehancuran atau chaos. Sebab

bila sampai chaos, maka yang ada bukan lagi demokrasi tetapi kesewenangan atau otoriter sebab prinsip mendasar yang menjadi tujuan demokrasi adalah produktivitas. Produktivitas yang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran Bangsa serta Negara.

Di satu sisi konflik horizontal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jakarta pada akhir-akhir ini sangat lekat sekali dengan kekerasan yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Menurut Emile Durkheim bahwa kekerasan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat sepanjang kekerasan masih normal-normal saja, dimana masyarakat masih mampu mengakomodasinya maka segala sesuatunya masih ada dan kehidupan sosial berlangsung dengan baik selama konflik yang terjadi dalam masyarakat berada pada tingkat teratasi. Masyarakat memang siap dan disiapkan untuk menghadapi kekerasan tersebut. Masyarakat menghadapinya dengan menciptakan situasi arsitektur sosial-institusional, dimana berbagai institusi didirikan dengan fungsi mengendalikan kekerasan dimulai dari legalisasi, hukum, polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan lain-lain. Sekalian institusi tersebut boleh disebut sebagai merefleksikan perjuangan manusia untuk mengendalikan konflik tidak menjerus pada tindakan kekerasan.

Dalam hampir semua kasus konflik, pola pikir generalisasi berkembang subur, tindakan perseorangan diidentikan sebagai perbuatan kelompok massa, dalam keadaan seperti ini pola-pola pikir induktif disingkirkan dan metode penanganan kasus perkasus hampir tidak mendapat tempat. Akibatnya banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah kemudian menjadi korban dan bahkan harta benda yang dirasakan bermanfaat bagi kelompok lawannya juga menjadi sasaran penghancuran.

Bentuk konflik seperti ini biasanya diawali oleh adanya kesalahpahaman yang umumnya hanya disulut oleh hal-hal kecil, kemudian menjalar dan berkembang menjadi sengketa massal, pada awal konflik tawuran, biasanya masing-masing individu merasakan adanya keresahan-keresahan diantara mereka. Keresahan ini bila bergabung, lalu menjadikan suatu kumpulan individu-individu yang tidak puas atau kelompok tertindas. Kondisi ini menurut Le Vine dan Campbell seperti yang dikutip oleh Oscar, Feedmman, dan Peplau (1990) sering disebut sebagai konflik kelompok yang realistik, konflik seperti ini digambarkan sebagai dua kelompok yang berada dalam situasi bersaing untuk memperebutkan sumber langka yang sama-sama mereka butuhkan, orang-orang yang kalah akan cenderung menolak kekalahannya dan tumbuh menjadi kelompok yang memberontak terhadap kekalahannya tersebut. Bila keadaan ini berlarut-larut dan kemudian ada pemicunya maka akan timbul perilaku agresif dan memungkinkan terjadinya konflik.

Sebagai contoh konflik tawuran antar warga di Matraman dapat berkembang menjadi sebuah perkelahian massal yang besar dan berlarut karena disulut oleh dua hal yaitu :

Pertama, adalah karena melihat teman/kelompoknya berkelahi kemudian mereka ikut bergabung sebagai bentuk kebersamaan. Keadaan ini menurut Bandura (1980 : 4) secara teori disebut sebagai proses belajar observasional, yaitu sebuah proses tawuran yang disebabkan karena melihat kelompok-kelompok/lingkungannya melakukan tawuran terhadap kelompok lain yang menjadi musuhnya kemudian ikut-ikutan berkelahi sebagai bentuk rasa solidaritas diantara mereka atau mungkin sebab lain yang membentuk perilaku untuk melakukan

tindakan berkelahi seperti rekayasa, pelampiasan kekesalan, mencari jati diri sebagai pemuda yang berani dan lain-lain.

Kedua, tawuran warga Matraman dapat terjadi karena kurang/tidak tegasnya aparat yang berwenang dalam menerapkan punishment/sanksi bagi mereka yang terlibat tawuran, padahal punishment atau hukuman yang tegas adalah salah satu cara untuk mengurangi perilaku agresif atau perilaku yang dapat melukai orang lain, karena dengan diterapkan hukuman, maka akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang sama di masa mendatang.

Dengan menggunakan dasar pemikiran diatas, tampak benang merah yang melatarbelakangi sebab timbulnya tawuran warga Matraman, diantaranya adalah karena adanya kelompok massa dengan identitas tertentu, merasa tidak puas, terhadap kelompok massa yang lain dan ketidakpuasan ini dirasakan secara kolektif oleh para anggota masing-masing. Keadaan seperti ini bila kemudian ada pemicunya, maka yang terjadi adalah perkelahian dan penggunaan kekuatan kemudian dijadikan sebagai model dalam penyelesaian sengketa diantara mereka. Tawuran seperti ini juga bersifat laten, artinya dapat berhenti dan kemudian sewaktu-waktu muncul kembali dengan eskalasi yang sama atau bahkan lebih besar lagi.

AKAR PENYEBAB KONFLIK HORIZONTAL.

Dengan menggunakan pendekatan pemikiran diatas dan sudut pandang Kamtibmas maka akar penyebab terjadinya konflik horizontal di masyarakat Jakarta sebagai berikut :

1). Pondasi pendidikan dalam keluarga dan kehidupan sosial yang kita punyai lebih menekankan pada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai perbed aan

dan konflik.

2). Penekanan pada penggunaan kekerasan untuk memenangkan suatu argumen pendapat atau sesuatu persaingan dalam perebutan sumber daya atau sumber rejeki atau posisi publik dan kehormatan sosial mungkin telah dipicu oleh berbagai bentuk provokasi para pemimpin kelompok yang ada.

3). Disamping itu, berbagai bentuk frustrasi dan keputusasaan karena kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar warga golongan sosial bawah di DKI Jakarta telah memungkinkan untuk mudah terwujudnya kumpulan orang atau crowd yang dengan cepat merupakan diri mereka sebagai kelompok dan mob atau pasukan amuk massa. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan perasaan frustrasi dan keputusasaan dengan cara melakukan tindakan kekerasan dan atau dengan juga menjarah harta benda milik yang dihancurkan.

4). Seringkali tindakan-tindakan kekerasan yang ditujukan pada sesuatu kelompok tertentu dipimpin oleh tokoh-tokoh dari kelompok penyerang, tokoh-tokoh tersebut memulai kegiatannya dengan menyebarkan isu. Bila isu diterima oleh anggota-anggota kelompoknya maka pengorganisasian kelompok penyerang dapat dilakukan. Pengorganisasian biasanya menekankan kegiatannya dengan menstimuli keterlibatan kerumunan massa yang ada disekitar sasaran serangan, untuk menghindarkan dikenalnya jati diri mereka.

5). Dalam berbagai kasus konflik kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di DKI, isu agama dipakai sebagai penggerak massa sehingga sadar atau tidak sadar mereka yang menyaksikan peristiwa yang terjadi atau yang mendengar teriak para pelaku pengrusakan dengan kekerasan tersebut akan berbaaur dalam konflik tersebut.

UPAYA PENANGGULANGAN KONFLIK HORIZONTAL.

Dengan melihat uraian diatas maka dari sudut pandang Kamtibmas paling tidak konflik horizontal masyarakat Jakarta dapat ditanggulangi melalui sebagai berikut :

1). Penanggulangan sebuah konflik permanen yang mempunyai sifat konflik dan disebabkan karena faktor perbedaan idiologi dan kekuasaan biasanya hanya dapat diselesaikan dengan mengalahkan atau menghilangkan salah satu yang terlibat konflik. Sebaliknya konflik yang bersifat "Konflik-Integration" yang disebabkan karena masalah-masalah yang lebih kecil dan hanya merupakan sebuah fenomena dari pergesekan sosial kemasyarakatan, biasanya masih sangat memungkinkan untuk diselesaikan dengan tuntas.

Konsep penyelesaian sebuah konflik yang bersifat "Konflik-Integration" dengan cara menyumbat saluran komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan menanggapinya dengan sifat represif atau pemaksaan dan penindasan struktural serta pengawasan ketat yang dilakukan oleh penguasa atau oleh kelompok dominan hanya membuat kelompok yang lemah menjadi semakin tidak berdaya, keadaan ini hanya efektif mampu meredam konflik dalam jangka waktu tertentu, namun dalam kerangka jangka panjang, kondisi ini tidak menyelesaikan masalah bahkan justru menimbulkan konflik atau permusuhan bersifat laten, rumit dan menyimpan kekuatan berlawanan yang dapat meledak sewaktu-waktu.

Karena itu, upaya penanggulangan yang efektif harus didasarkan kepada tindakan yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dengan menitik-beratkan kepada upaya menemukan motivasi berkaitan dengan apa yang menjadi sumber konflik, serta membuka

saluran hubungan/komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat melakukan komunikasi dan negosiasi.

2). Negosiasi artinya bahwa konflik biasanya selalu menampilkan sebuah interaksi yang rumit antara kekuatan-kekuatan yang berbeda dan terjadi karena didorong oleh kecurigaan dan kurangnya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Upaya penanggulangan sebuah konflik khususnya yang bersifat Konflik - Integration sangat efektif jika dilakukan dengan membuka saluran hubungan yang diwujudkan dalam sebuah kesepakatan/negosiasi.

Negosiasi itu sendiri menurut Peter Haris dan Ben Reilly (2000 : 107) diartikan sebagai sistim atau proses bagi penyelesaian konflik dengan membawa pihak-pihak yang bertikai melakukan tawar menawar bagi sebuah penyelesaian konflik. Negosiasi ini dapat terwujud jika masing-masing pihak yang terlibat, telah mempunyai persepsi yang sama dalam melihat konflik, karena itu, negosiasi yang efektif harus dijalankan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang, kemampuan, mempunyai kekuasaan yang cukup memadai, dapat bersikap netral serta dalam kapasitas tertentu mampu membangun derajat kepercayaan pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak ketiga ini dapat sebagai orang, kelompok, institusi atau negara yang kemudian berperan menjadi fasilitator dalam proses negosiasi.

Negosiasi yang bermuara pada tercapainya kompromi penyelesaian konflik yang berhasil, harus juga didasarkan kepada kepercayaan, serta persamaan derajat dan kepentingan mereka yang terlibat konflik, sehingga mereka dapat merasakan adanya keadilan bagi sebuah solusi damai yang dianggap saling menguntungkan. Karena itu jika polisi ingin mengelola menanggulangi konflik secara efektif dengan

proses negosiasi / kompromi, maka prosedur yang pertama harus dilakukan adalah membuka saluran komunikasi, bersikap adil serta mampu membangun kepercayaan yang terlibat konflik.

3) Pihak Polda Metro Jaya memandang masyarakat Jakarta secara religius, kultur, etnis dan rasial dengan melalui pendekatan sebagai berikut :

a. Pre-emptif

1). Menumbuhkan disiplin masyarakat agar menaati norma agama, hukum dan sosial untuk mewujudkan kesabaran, sopan santun dan kesadaran masyarakat.

2). Mendorong masyarakat untuk hidup dengan pola keterbukaan melalui dialog.

b. Preventif

Melakukan bimbingan dan penyuluhan agar masyarakat dapat menghindari benturan-benturan kepentingan, isu adu domba, sensasi, salah paham, balas dendam dan terror.

c. Penegakan Hukum

Bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penegakan hukum agar konflik horizontal di masyarakat tidak timbul dan bisa dieliminir semaksimal mungkin.

PENUTUP.

Makalah ini disusun sebagai bahan acuan dalam mencari akar konflik horizontal masyarakat Jakarta, semoga menjadi sumbangan dalam mewujudkan masyarakat Jakarta yang "Tata Tentrem Kerta Raharja".

DAFTAR BACAAN.

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung Remadja Karya.

Geroge L. Kelling, M. Coles, 1998, *Fixing Broken Windows* Penyadur Kunarto, Jakarta Cipta Manunggal.

Hagedorn, John, 1988, *With Perry Macon People And Folks*, Lake View Press, Chicago.

Herlianto, 1997, *Urbanisasi Pembangunan Dan Kerusuhan Kota Bandung*, PT. Alumni.

Peter Haris dan Ben Relly, 2000, *Demokrasi Dan Konflik Yang Mengakar Sejumlah Pikiran Untuk Negosiator*.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Masyarakat, Kekerasan, Hukum dan Polisi*, Makalah Seminar Sespim Polri.

Suparlan, Parsudi, 1995, *Kemiskinan di Perkotaan Jakarta*, Yayasan Obor Indonesia. 1999, *Antropologi Indonesia*, Universitas Indonesia.

2000, *Perang Matraman*, Majalah Tempo.

Widodo, B. Umar, 1997, *Konflik dan Alienasi*.